

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gastrodiplomasi adalah jembatan yang menghubungkan bangsa dengan komunitas internasional melalui bahasa rasa. Makanan memiliki kemampuan unik untuk menjembatani berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia, mendorong dialog yang lebih luas serta memperdalam wawasan lintas budaya (Sharma & Sharma, 2020). Selain itu, kuliner memainkan peran penting dalam menarik perhatian global, baik melalui festival makanan internasional, acara diplomatik, maupun kampanye promosi yang menonjolkan kekayaan kuliner suatu negara.

Melalui kampanye "*Kitchen of the World*" Tailan berhasil mempromosikan masakan tradisionalnya ke kancah global dan menggunakannya untuk memperkuat hubungan diplomatik (Kittipong, 2021). Korea Selatan juga memanfaatkan popularitas global dari makanan seperti *kimchi* dan *bibimbap* untuk memperkenalkan budayanya sekaligus mendukung penyebaran gelombang budaya Korea (*Hallyu*) seperti musik, film, dan makanan (Lee & Kwon, 2019). Jepang turut menerapkan gastrodiplomasi dengan mengadakan demonstrasi memasak dan sesi mencicipi makanan melalui perwakilan diplomatiknya di luar negeri, sebagai upaya untuk mempererat kerja sama dengan negara mitra (Tanaka, 2020). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memanfaatkan gastrodiplomasi melalui produk indomie yang kini

mendunia khususnya di negara seperti Nigeria dan Afrika. Gastrodiplomasi juga digunakan oleh Tiongkok sebagai salah satu bentuk *soft power* khususnya dalam mengeksport budaya seperti makanan dan hiburan.

Penggunaan makanan sebagai alat *soft power* oleh Tiongkok merupakan isu yang sangat relevan di dunia modern. Seiring dengan globalisasi, berbagai negara berupaya meningkatkan *soft power* mereka untuk mempengaruhi orang lain dengan lebih baik dan memenangkan hati khalayak asing. Dengan penekanan yang semakin meningkat pada diplomasi budaya dan promosi budayanya, terutama makanannya, Tiongkok merupakan salah satu negara yang paling produktif dan sukses di bidang ini.

Ketika masyarakat Tionghoa bermigrasi ke berbagai wilayah di dunia, mereka membawa serta kebiasaan kuliner mereka. Proses globalisasi informal masakan Tiongkok berlangsung dengan pesat karena peran diaspora Tionghoa yang membuka restoran dan usaha kuliner di negara-negara tujuan. Melalui proses migrasi ini, masakan Tiongkok semakin dikenal dan diterima di berbagai masyarakat.

Selain kontribusi dari komunitas diaspora, pemerintah Tiongkok juga secara aktif mendorong promosi kuliner mereka ke luar negeri melalui strategi *soft power* dan gastrodiplomasi yang lebih luas. Upaya ini mencakup promosi pendirian restoran Tiongkok di berbagai negara, pengembangan rantai pasokan untuk menjaga cita rasa tradisional, serta penyelenggaraan festival dan pameran kuliner internasional. Aktivitas ini juga meliputi impor bahan-bahan utama, pembangunan infrastruktur pasokan lokal, promosi makanan halal khas

Tiongkok di Inggris, dan pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan diplomasi kuliner.

Lebih lanjut, masakan Tiongkok juga mengalami penyesuaian di negara-negara tujuan guna menyesuaikan dengan selera dan budaya lokal. Pelaku usaha kuliner cenderung mengadaptasi sistem layanan dan penyajian tanpa meninggalkan keaslian cita rasa masakan tradisional. Hal ini turut berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan popularitas masakan Tiongkok, salah satunya ialah Inggris.

Menurut Featherstone dan Tamari (2020), makanan Tiongkok atau lebih dikenal dengan *Chinese food* di Inggris menggambarkan bagaimana budaya konsumen, hubungan kelas, dan globalisasi budaya saling bersinggungan. *Chinese food* telah menjadi makanan arus utama dan bahkan makanan kelas atas dalam budaya makanan Inggris, dari status makanan etnis marjinal. Perubahan ini dipicu oleh peningkatan imigrasi, perdagangan global, dan munculnya kelas menengah konsumen yang memanfaatkan variasi kuliner sebagai penanda gaya hidup dan status budaya.

Secara historis, masakan Tiongkok di Inggris pertama kali diimpor melalui jaringan komunitas kecil dan kemudian dipromosikan melalui makanan untuk dibawa pulang pada 1960-an sampai 1980-an, di kalangan konsumen kelas pekerja. Pada tahun 1990-an dan seterusnya, pendirian restoran kelas atas seperti Hakkasan membawa transisi menuju eksotisme kembali *chinese food* di ruang makan kelas atas yang mengglobal. Diaspora Tionghoa telah menjadi kunci dalam proses transformasi makanan tradisional dan memperkenalkannya ke dalam menu Inggris dengan membuka restoran, mengembangkan rantai

pasokan, dan menulis ulang hidangan tradisional agar sesuai dengan selera lokal.

Setelah mengalami stereotip budaya dan narasi pengucilan etnis dalam beberapa dekade sebelumnya, *Chinese food* saat ini telah berakar kuat dalam budaya makanan Inggris dan telah menjadi *soft power* yang mempromosikan pertukaran lintas budaya dan meningkatkan reputasi global Tiongkok. Perubahan ini juga menunjukkan bagaimana masakan dapat menjadi alat interaksi multikultural dan diplomasi budaya simbolik (Featherstone & Tamari, 2020).

Chinese food di Inggris telah membawa berbagai dampak sosial-budaya yang signifikan. Hal ini berkontribusi pada arus utama *Chinese food* sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Inggris pada umumnya, khususnya melalui kejenuhan makanan yang dibawa pulang sejak tahun 1960-an dan seterusnya, sehingga makanan ini menjadi pilihan yang akrab di sepanjang kelas dan wilayah. *Chinese food* telah bertindak sebagai *soft power* dan asimilasi budaya yang menumbuhkan pemahaman antar budaya dan orientasi terhadap budaya Tiongkok dengan cara yang positif tanpa komunikasi politik secara langsung.

Peningkatan popularitas dan visibilitas *Chinese food* membantu mematahkan stereotip rasial, serta memposisikan kembali budaya Tiongkok sebagai budaya yang dihargai dan aspiratif dalam persepsi publik. Diversifikasi regional *Chinese food* di pusat-pusat kota seperti London dan Manchester membuka pemahaman masyarakat Inggris yang lebih luas tentang heterogenitas dalam lanskap budaya internal Tiongkok, meningkatkan kecerdasan kuliner dan kesadaran budaya. Efek tambahan ini menunjukkan bagaimana bisa mempunyai fungsinya jadi jembatan budaya dan alat diplomatik yang tidak berwujud.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Batasannya permasalahan ditetapkan studi ini berfokus dalam strategi dan dampak gastrodiplomasi Tiongkok terhadap sosial budaya di Inggris. Berdasarkan topik tersebut, perumusan masalahnya pada studi yang dilaksanakan yakni:

1. Bagaimana strategi Tiongkok memperluas pengaruh *Chinese Food* di Inggris?
2. Bagaimana dampak *Chinese Food* terhadap hubungan masyarakat Tiongkok dengan Inggris?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan pada studi yang dilaksanakan yakni:

1. Guna melihat bagaimana strategi Tiongkok memperluas pengaruhnya *Chinese Food* di Inggris
2. Guna melihat bagaimana dampak *Chinese Food* terhadap hubungan masyarakat di Inggris

1.4 Kegunaan Penelitian

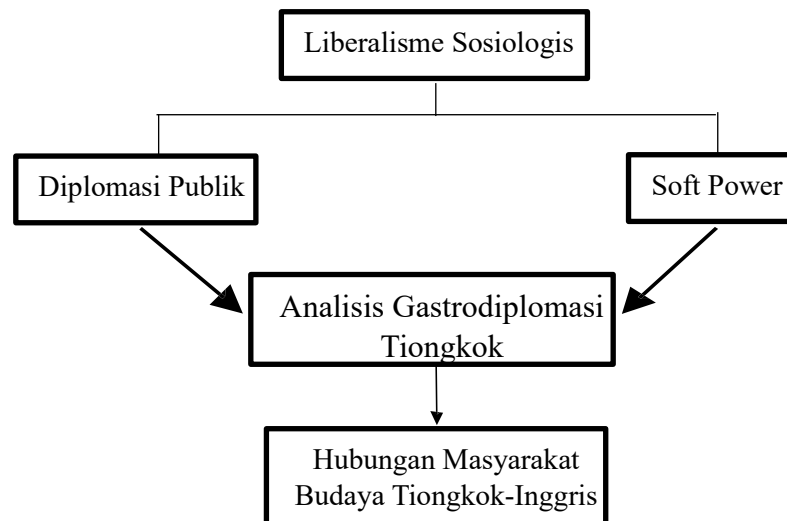
Terdapat kegunaan diharapkan pada studi ini yakni:

1. Bagi penulis, Adanya harapan mampu memberi pemahaman strategi Tiongkok memperluas pengaruh *Chinese Food* di Inggris. Penelitian ini

juga berupaya memberikan penjelasan bagaimana dampak *Chinese Food* terhadap sosial budaya di Inggris.

2. Bagi akademisi, Adanya harapan mampu memberi referensinya bagi para mahasiswa khususnya pada studi Ilmu Hubungan Internasional dan studi serupa baik itu untuk penelitian dalam pengerjaan tugas kuliah maupun dalam melanjutkan studinya.

1.5 Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh *Penulis*

Studi ini memakai satu teori serta dua konsep untuk membedah dua variable di dalamnya. Teori yang akan digunakan adalah teori liberalisme sosiologis, serta konsep dipakai yakni Diplomasi Publik dan *Soft Power*. Teori liberalisme sosiologis akan digunakan untuk menjelaskan alasan dari adanya masyarakat Tiongkok di Inggris. Kemudian konsep Diplomasi Publik akan menggambarkan bagaimana analisis gastrodiplomasi Tiongkok di Inggris. Dan yang terakhir, *Soft Power* akan digunakan untuk menggambarkan bagaimana

gastrodiplomasi Tiongkok ini memiliki dampak pengaruh terhadap hubungan sosial budaya antar Tiongkok dengan Inggris.

1. Liberalisme Sosiologis

Teori liberalisme sosiologis ialah teori pada hubungan internasional yang menolak pandangan realis yang terlalu berfokus pada negara sebagai aktor utama. Sebaliknya, Paradigma ini menekankan pentingnya hubungan antarnegara dalam hubungan internasional. Para sosiolog liberal memandang hubungan transnasional antara individu dan organisasi dari negara lain sama pentingnya dengan hubungan antara pemerintah negara saat membahas hubungan internasional (Rosenau, 1990)

Salah satu tokoh terbesar liberalisme sosiologis, James N Rosenau menekankan bahwa tindakan individu dan kelompok dalam urusan dunia sangat relevan terhadap masalah global. Ia mengidentifikasi transformasi sistem internasional dari yang berpusat pada negara menjadi sistem internasional multi-sentris dengan berbagai aktor yang hidup berdampingan dan saling bersaing, baik yang terikat oleh kedaulatan maupun yang tidak terikat di luar kedaulatan. Dunia yang semakin pluralistik ini, dengan jaringan global yang melimpah, dipandang lebih mungkin untuk mencapai perdamaian.

Strategi gastrodiplomasi Tiongkok terhadap Inggris mencerminkan prinsip-prinsip liberalisme sosiologis yang menekankan

pentingnya hubungan antar masyarakat dalam membentuk tatanan internasional yang damai dan kooperatif. Melalui promosi kuliner dan interaksi budaya yang bersifat informal, Tiongkok menciptakan ruang bagi diplomasi antar masyarakat (*people-to-people diplomacy*) yang memungkinkan terjadinya pertukaran sosial, penurunan prasangka, dan pembentukan persepsi positif terhadap budaya Tionghoa. Makanan sebagai medium komunikasi budaya berfungsi untuk mendekatkan masyarakat Inggris dengan nilai-nilai tradisional dan kontemporer Tiongkok, sehingga memperkuat jejaring sosial lintas budaya.

Dalam kerangka liberalisme sosiologis, strategi ini dipandang sebagai mekanisme yang efektif untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian antara komunitas lintas negara, dengan harapan bahwa hubungan sosial yang erat dapat menopang kerja sama antarnegara yang lebih stabil dan damai dalam jangka panjang.

2. Diplomasi Publik

Gastrodiplomasi adalah “Pendekatan diplomasi publik yang memanfaatkan kekuatan makanan sebagai sarana untuk pemahaman budaya dan branding nasional guna menghumanisasi budaya lain melalui indra perasa dan peraba” (Rockower, 2012), yang melibatkan penggunaan makanan dalam pencitraan negara (Wilson, 2013), serta menjadi ruang pertemuan antara budaya kuliner dan kebijakan luar negeri. Istilah “diplomasi publik” diperkenalkan dalam wacana akademik pada 1965 oleh Edmund Gullion, diplomat senior dan dekan di *School of Law and*

Diplomacy, Universitas Tufts, saat mendirikan Edward R. *Murrow Center for Public Diplomacy*. Menurut pusat tersebut, diplomasi publik adalah pengaruh opini publik dalam perumusan serta pelaksanaannya kebijakan luar negeri, mencakup aspek hubungan internasional di luar diplomasi tradisional.

Griffin Malone memperluas definisi diplomasi publik dengan menekankan bahwa pemahaman terhadap pihak lain merupakan kunci keberhasilannya. Ia menyatakan bahwa jika kita ingin berhasil membangun pemahaman tentang masyarakat dan kebijakan kita, maka kita harus terlebih dahulu memahami tema-tema utama, latar belakang budaya, konteks sejarah, karakter psikologis, dan tentu saja bahasa dari masyarakat yang ingin kita ajak berkomunikasi.

Gastrodiplomasi ialah cabang lainnya dari diplomasi publik di mana *soft power* berperan jadi alat perjuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, gastrodiplomasi mendapat perhatian lebih dan diibaratkan sebagai kuah bagi nasi dalam diplomasi. Gastrodiplomasi juga merupakan metode komunikasi nonverbal yang sangat kuat dan efektif.

Diplomasi publik hadir dalam berbagai bentuk, dan gastrodiplomasi menawarkan strategi halus bagi negara dan wilayah untuk melampaui sekadar keahlian, serta menarik perhatian dunia melalui nilai-nilai kulinernya. Strategi ini memberikan manfaat timbal balik dalam membentuk pola global yang sesuai. Nilai-nilai demokratis tercermin

melalui kuliner yang diterima secara global, dari makanan sehari-hari hingga hidangan mewah. Peradaban ditandai oleh budaya makannya. Budaya dimulai dan diakhiri di atas piring (Donovan, 2012).

3. *Soft Power*

Istilah *soft power* dicetuskan oleh Joseph Nye, yang menjelaskan bahwa kekuasaan memiliki berbagai bentuk. *Soft power* sendiri merujuk pada bentuk kekuasaan yang diperoleh melalui pendekatan yang halus dan tidak memaksakan kehendak. Kekuasaan ini bersifat menarik, seperti daya tarik sebuah magnet.

Nye menekankan bahwa *soft power* berbeda dari *command power*, yang oleh para ahli lain disebut sebagai *hard power*. *Command power* adalah kemampuan untuk mengubah perilaku pihak lain dan bergantung pada paksaan biasanya melalui kekuatan militer atau imbalan, seperti bantuan finansial. Pada saat yang sama, daya tarik budaya dan nilai-nilai suatu negara, atau potensinya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik, merupakan bentuk dari *soft power*.

Kekuatan ini adalah kemampuan suatu negara untuk memengaruhi negara lain tanpa menggunakan senjata atau uang. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya *soft power* Tiongkok serta meluasnya bantuan luar negerinya telah menarik perhatian besar dari para pembuat kebijakan, jurnalis, dan analis di berbagai belahan dunia.

1.6 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metodologi riset dipakai pada skripsi ini bersifat kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dan fakta untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai topik yang diangkat. Pengumpulan data dilakukan melalui kompilasi informasi dari berbagai sumber terpilih, termasuk artikel, jurnal, buku, studi kasus yang relevan, dan sumber online yang kredibel. Fokus dari metode ini adalah menjelaskan dan menganalisis strategi gastrodiplomasi yang dilakukan Tiongkok terhadap hubungan sosial budaya dengan Inggris.

2. Jenis Data

Data sekunder adalah jenis informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Pada tahap ini, peneliti menganalisa datanya sekunder didapat dari beragam sumber elektronik dan cetak, termasuk buku, jurnal, catatan pemerintah, dan situs web.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi literatur akan dipakai dalam metodologi penghimpunan data. Membaca secara luas, membuat catatan rinci, dan mengorganisir catatan tersebut merupakan bagian dari ulasan literatur, yang merupakan metode pengumpulan data. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, penulis akan merujuk pada sumber-sumber yang dapat dipercaya dan otoritatif seperti buku, jurnal, dokumen pemerintah, situs web, dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam studi ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisa data. Untuk memahami temuan studi, para peneliti sering menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penulis akan menganalisa tulisan deskriptif yang berfungsi sebagai data sekunder pada studi ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Terdapat Sistematika Penulisan dalam studi ini yang diuraikan jadi lima bab, yakni:

BAB 1 Pendahuluan memberikan gambaran umum terkait topik penelitian yakni Analisis Gastrodiplomasi Tiongkok terhadap Hubungan Sosial Budaya dengan Inggris. Bab ini menjelaskan alasan kenapa topik ini dipilih oleh peneliti, menguraikan ruang lingkup, pertanyaan, tujuan serta manfaat, kerangka konseptual, dan membahas metodologi riset kualitatif yang digunakan. Bab ini menjadi dasar untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang konteks penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka menjadi bab yang menjelaskan terkait satu teori serta dua konsep dipakai pada studi ini. Teorinya akan dipakai ialah teori liberalisme sosiologis, serta konsep dipakai yakni Diplomasi Publik dan *Soft Power*. Teori liberalisme sosiologis akan digunakan untuk menjelaskan alasan dari adanya masyarakat Tiongkok di Inggris. Kemudian konsep Diplomasi Publik akan menggambarkan bagaimana strategi gastrodiplomasi Tiongkok di Inggris. Dan

yang terakhir, *Soft Power* akan digunakan untuk menggambarkan bagaimana gastrodiplomasi Tiongkok ini memiliki dampak pengaruh terhadap hubungan sosial budaya antar Tiongkok dengan Inggris. Dalam bab ini juga akan dikaji mengenai penelitian terdahulu yang membantu penelitian sekaligus membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu.

BAB 3 Gambaran Umum menjadi bab yang akan menjelaskan terkait penjelasan umum mengenai variabel penelitian yang akan dilaksanakan. Pertama, akan dijelaskan secara umum mengenai sejarah hadirnya orang Tionghoa di Inggris. Kedua, akan dijelaskan secara umum mengenai globalisasi *chinese food* dalam dunia internasional.

BAB 4 Pembahasan menjadi bab yang akan menjelaskan hasil analisis dalam penelitian ini guna menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Analisis yang akan dilakukan adalah terkait bagaimana strategi Tiongkok dalam memperluas pengaruh *chinese food* di Inggris. Kemudian akan dilihat bagaimana dampak *chinese food* terhadap hubungan sosial budaya Tiongkok dengan Inggris.

BAB 5 Kesimpulan menjadi bab yang akan merangkum hasil penelitian yang menjawab keseluruhan pertanyaan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Liberalisme Sosiologis

Salah satu aliran pemikiran dalam hubungan internasional, yang dikenal sebagai liberalisme, berpendapat bahwa persaingan kekuasaan dan konflik bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi interaksi antar negara; kerja sama yang berkelanjutan juga sangat penting. Pendekatan pada teori ini berangkat dari asumsi bahwa individu ataupun kelompok masyarakat memiliki kapasitas untuk membangun kepentingan bersama, sehingga interaksi lintas negara tidak selamanya bersifat kompetitif. Dalam teori liberalisme, suatu hubungan antar negara dipahami ialah hasil dari berbagai proses sosial, ekonomi, dan politik yang melibatkan lebih dari sekadar pemerintah negara (Dunne et al., 2016).

Dalam kerangka liberalisme, negara tidak dipandang sebagai satu-satunya aktor yang relevan dalam hubungan antarnegara. Interaksi yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi, dan juga individu secara lintas negara juga dianggap memiliki peran penting dalam membentuk pola hubungan antarnegara. Menurut Keohane dan Nye menjelaskan bahwa semakin saling bergantung pada satu negara dengan negara lainnya pada suatu hubungan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, namun interaksi sosial dan ekonomi masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini. Hubungan antarnegara tidak hanya dibentuk melalui keputusan politik elite

negara, namun juga melalui dinamika sosial yang berkembang di antara masyarakat lintas negara. Seiring dengan perkembangan pemikiran mengenai liberalisme mulai berkembang ke arah pendekatan yang lebih menekankan dimensi sosial dalam hubungan antarnegara, yang kemudian dikenal dengan liberalisme sosiologis.

Dalam teori liberalisme sosiologis menolak pandangan bahwa realis terlalu berfokus pada negara jadi aktornya utama pada hubungan internasional. Namun pada teori ini memberikan pemahaman bahwa interaksi antar masyarakat memiliki peran yang penting. Interaksi yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok, serta organisasi lintas negara juga termasuk dalam pemahaman teori ini. Kaum liberalisme sosiologis melihat bahwa hubungan internasional bukan semata-mata hanya hubungan antar pemerintah negara, namun juga terjadi hubungan transnasional antara individu dan kelompok dari berbagai negara (Rosenau 1990)

Untuk memberikan gambaran mengenai fokus pendekatan liberalisme sosiologis, teori ini memiliki beberapa karakteristik utama diantaranya :

- Peran masyarakat dan individu

Masyarakat dan individu merupakan aktor sosial yang memiliki kapasitas penting dalam mempengaruhi hubungan antarnegara melalui interaksi sosial lintas negara

- Pengakuan terhadap aktor non-negara

Pendekatan ini mengakui bahwa aktor non-negara, keberadaan organisasi sosial, komunitas, dan jaringan lintas negara merupakan bagian dari dinamika hubungan antarnegara yang memiliki peran

dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap negara lain.

- Penekanan pada interaksi sosial lintas negara

Liberalisme sosiologis menekankan bahwa interaksi sosial lintas negara, baik yang bersifat formal maupun informal, memiliki dampak terhadap kualitas hubungan antarnegara.

- Keterkaitan antara tingkat individu dan negara

Pendekatan ini melihat adanya hubungan antara interaksi sosial di tingkat masyarakat dengan dinamika hubungan antarnegara pada tingkat yang lebih luas (Risse, 2012; Keohane & Nye, 1989).

Hal ini menunjukkan bahwa liberalisme sosiologis memandang hubungan antarnegara sebagai proses sosial yang berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan. Baik tujuan politik negara-negara maupun realitas kehidupan masyarakat yang berinteraksi melintasi batas negara memengaruhi hubungan internasional. Perubahan sikap dan persepsi masyarakat dapat memberikan dampak terhadap pola hubungan antarnegara dalam jangka panjang.

Pemikiran James N. Rosenau memberikan landasan konseptual yang penting dalam memahami pendekatan sosial dalam liberalisme. Rosenau menjelaskan bahwa sistem global mengalami perubahan dari tatanan yang berpusat pada negara menuju tatanan yang bersifat multisentrik, di mana aktornya negara serta aktor non-negara hidup berdampingan serta sama-sama berperan dalam dinamika global. Dalam tatanan multisentrik ini, fenomena lintas negara serta hubungan antara tingkat individu, kelompok, dan negara

menjadi semakin relevan dalam menjelaskan perubahan global dan hubungan antarnegara (Rosenau, 1990).

Dalam konteks yang lebih aplikatif, pendekatan sosial dalam liberalisme digunakan untuk memahami praktik interaksi budaya yang melibatkan masyarakat secara langsung. Interaksi budaya dipandang sebagai sarana komunikasi sosial yang efektif karena bersifat inklusif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui interaksi budaya tersebut, masyarakat dari latar belakang yang berbeda dapat saling mengenal serta membangun persepsi yang lebih positif satu sama lain (Cull, 2009).

Hubungan masyarakat lintas negara yang terbangun melalui interaksi budaya sering kali berlangsung secara informal dan berkelanjutan. Interaksi semacam ini memungkinkan terbentuknya kepercayaan sosial yang menjadi fondasi bagi hubungan antarnegara yang lebih stabil. Dalam konteks ini, hubungan masyarakat tidak hanya mempunyai fungsinya jadi pelengkap kebijakan negara, namun jadi faktor yang dapat memengaruhi kualitas hubungan antarnegara dalam jangka panjang.

Salah satu bentuk interaksi budaya yang relevan dalam kerangka ini adalah gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi memanfaatkan makanan sebagai medium komunikasi budaya yang memungkinkan terjadinya perjumpaan sosial lintas budaya. Rockower menjelaskan bahwa makanan memiliki kekuatan simbolik dan emosional yang dapat mendekatkan masyarakat, sehingga efektif digunakan sebagai sarana untuk membangun penerimaan serta citra positif suatu negara di mata masyarakat asing (Rockower, 2012).

Pendekatan sosial dalam liberalisme digunakan untuk memahami bagaimana interaksi sosial lintas negara yang melibatkan masyarakat dapat berkontribusi dalam membentuk hubungan antarnegara. Melalui berbagai bentuk interaksi budaya yang bersifat informal, masyarakat dari latar belakang yang berbeda memperoleh ruang untuk saling berinteraksi dan membangun pemahaman bersama. Interaksi sosial semacam ini dipandang memiliki peran dalam membentuk persepsi, mengurangi jarak budaya, serta memperkuat hubungan masyarakat lintas negara. Dalam jangka panjang, relasi sosial yang berkembang di tingkat masyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya hubungan antarnegara yang lebih stabil dan kooperatif (Chapple-Sokol, 2013).

Secara keseluruhan, liberalisme sosiologis memandang hubungan antarnegara sebagai proses sosial yang terbentuk melalui interaksi berkelanjutan di tingkat masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa relasi antarnegara tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan formal negara, tetapi juga oleh pola interaksi sosial yang berkembang melalui hubungan antar individu, kelompok, dan komunitas lintas negara. Interaksi sosial tersebut berperan dalam membentuk persepsi, sikap, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap negara lain, sehingga memberikan kontribusi terhadap kualitas hubungan antarnegara dalam jangka panjang.

Dengan menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam dinamika hubungan antarnegara, liberalisme sosiologis memberikan kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai peran hubungan sosial lintas negara.

Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana interaksi yang bersifat informal yang notabeneanya dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dapat menjadi fondasi bagi terciptanya hubungan antarnegara yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, liberalisme sosiologis menjadi landasan konseptual yang relevan untuk memahami dinamika hubungan antarnegara.

Dalam konteks penelitian ini, liberalisme sosiologis menjelaskan praktik gastrodiplomasi Tiongkok melalui *Chinese food* di Inggris sebagai proses interaksi sosial lintas negara yang berkembang di tingkat masyarakat. Kehadiran *Chinese food* dalam kehidupan masyarakat Inggris menciptakan ruang interaksi sosial informal yang mempertemukan masyarakat Tiongkok dan masyarakat Inggris secara berkelanjutan. Interaksi yang terjadi melalui praktik konsumsi makanan tersebut berkontribusi dalam membentuk persepsi, mengurangi jarak budaya, serta memperkuat hubungan sosial budaya antara masyarakat Tiongkok dan Inggris dalam jangka panjang. Dengan demikian, liberalisme sosiologis menjadi landasan konseptual yang relevan untuk memahami bagaimana gastrodiplomasi bekerja melalui relasi sosial masyarakat sebagai bagian dari dinamika hubungan internasional.

Dengan menggunakan perspektif liberalisme sosiologis, penelitian ini menempatkan gastrodiplomasi sebagai praktik hubungan internasional yang bekerja melalui interaksi sosial di tingkat masyarakat. Fokus utama pendekatan ini bukan pada kebijakan formal negara semata, melainkan pada bagaimana relasi sosial lintas budaya yang terbentuk melalui konsumsi *Chinese food* di Inggris berkontribusi dalam membangun persepsi, penerimaan, dan kedekatan

sosial antara masyarakat Tiongkok dan Inggris. Oleh karena itu, liberalisme sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan dinamika hubungan internasional yang berkembang dari bawah (*bottom-up*), melalui pengalaman sosial masyarakat sebagai bagian dari proses hubungan antarnegara.

2.2 Diplomasi Publik

Diplomasi publik merupakan konsep yang berkembang seiring dengan perubahan cara negara membangun hubungan dengan dunia luar. Interaksi langsung dengan masyarakat asing merupakan inti dari diplomasi publik, berbeda dengan penekanan konvensional pada komunikasi antar pemerintah dalam diplomasi tradisional. Melalui diplomasi publik, negara berupaya menyampaikan nilai, budaya, serta pandangan tertentu kepada publik internasional dengan tujuan membangun pemahaman dan citra yang positif. Pendekatan ini memandang masyarakat asing bukan hanya sebagai objek penerima pesan, tetapi sebagai aktor sosial yang memiliki peran dalam membentuk persepsi dan sikap terhadap negara lain. Salah satu bentuk diplomasi publik yang umumnya dilakukan dalam konteks ini adalah diplomasi antarmasyarakat, yang berfokus pada hubungan sosial antara negara-negara di luar saluran pemerintah formal dan sering melibatkan interaksi langsung antara kelompok (Cull, 2009).

Secara historis, istilah *public diplomacy* diperkenalkan dalam wacana akademik pada tahun 1965 oleh Edmund Gullion, seorang diplomat senior

Amerika Serikat sekaligus dekan di School of Law and Diplomacy, Universitas Tufts, bertepatan dengan pendirian *Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy*. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan upaya negara dalam memengaruhi opini publik asing melalui komunikasi, informasi, dan pertukaran budaya. Sejak saat itu, diplomasi publik berkembang sebagai pendekatan yang menempatkan komunikasi dan interaksi sosial sebagai elemen penting dalam hubungan antarnegara.

Dalam perkembangannya, diplomasi publik tidak lagi dipahami sebagai aktivitas komunikasi satu arah yang bersifat informatif atau persuasif semata. Diplomasi publik modern menekankan pentingnya dialog dan keterlibatan, di mana proses komunikasi berlangsung secara timbal balik antara negara dan masyarakat asing. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan konsep *dialogue-based diplomacy*, yaitu praktik diplomasi yang menekankan pertukaran gagasan dan keterlibatan aktif antara negara dan publik asing. Melalui interaksi semacam ini, diplomasi publik berfungsi sebagai sarana untuk membangun hubungan jangka panjang yang didasarkan pada saling pengertian, bukan sekadar penyampaian pesan politik (Melissen, 2005).

Perubahan konteks global turut memengaruhi praktik diplomasi publik. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas manusia memperluas ruang interaksi lintas negara. Dalam kondisi tersebut, pembentukan citra dan reputasi negara ini tidak ditentukannya dari kebijakan resmi pemerintah, tetapi juga oleh pengalaman langsung masyarakat asing dalam berinteraksi dengan unsur budaya, sosial, dan nilai-nilai suatu negara. Oleh karena itu, diplomasi publik semakin berkaitan dengan aktivitas sosial dan

kultural yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pertukaran budaya dan pendidikan, yang sering dirujuk sebagai *cultural exchange* (Pamment, 2013).

Diplomasi publik juga melibatkan peran aktor non-negara dalam proses penyampaian pesan dan pembentukan persepsi internasional. Lembaga budaya, institusi pendidikan, media, dan komunitas masyarakat memiliki kontribusi penting dalam menyebarkan nilai dan citra suatu negara kepada publik asing. Keterlibatan aktor non-negara ini memperluas jangkauan diplomasi publik dan menjadikannya sebagai proses yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Dalam konteks ini, diplomasi publik dipahami sebagai praktik kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam membangun hubungan dengan publik internasional (Snow & Taylor, 2009).

Dalam kerangka konseptual, diplomasi publik memiliki keterkaitan erat dengan upaya membangun kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat asing. Kepercayaan tersebut tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses interaksi sosial yang berulang dan berkelanjutan. Melalui diplomasi publik, negara berusaha menciptakan ruang komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan dan pengalaman, sehingga masyarakat asing dapat membentuk persepsi berdasarkan interaksi langsung, bukan semata-mata informasi resmi atau stereotip yang berkembang (Cull, 2009).

Diplomasi publik juga dipahami sebagai proses jangka panjang yang berorientasi pada pembentukan hubungan, bukan sekadar pencapaian tujuan politik sesaat. Keberhasilan diplomasi publik tidak diukur secara langsung, melainkan melalui perubahan sikap, persepsi, dan tingkat penerimaan

masyarakat asing terhadap suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, diplomasi publik menuntut konsistensi, keberlanjutan, serta kemampuan menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan konteks sosial dan budaya masyarakat sasaran.

Selain itu, diplomasi publik beroperasi dalam ruang sosial yang sangat dipengaruhi oleh dinamika opini publik dan arus informasi global. Negara tidak lagi sepenuhnya mengendalikan narasi mengenai dirinya di tingkat internasional, karena persepsi publik juga dibentuk oleh pengalaman sosial, pemberitaan media, dan interaksi lintas negara. Kondisi ini menjadikan diplomasi publik sebagai praktik yang bersifat terbuka dan adaptif, di mana negara perlu memperhatikan respons dan umpan balik dari masyarakat asing dalam membangun hubungan yang efektif.

Diplomasi publik ini berkontribusi dalam menjaga kesinambungan hubungan antarnegara di luar dinamika politik formal. Ketika hubungan antar pemerintah mengalami perubahan atau ketegangan, interaksi sosial yang telah terbangun di tingkat masyarakat dapat tetap berlangsung dan menjadi sarana komunikasi alternatif. Peran ganda diplomasi publik sebagai sarana komunikasi dan mekanisme sosial untuk memupuk hubungan internasional yang stabil dalam jangka panjang telah terbukti secara jelas.

Dalam konteks penelitian ini, diplomasi publik digunakan untuk menjelaskan bagaimana Tiongkok membangun hubungan dengan masyarakat Inggris melalui pendekatan non-formal yang menyasar publik asing secara langsung. Diplomasi publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen komunikasi negara, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang bekerja melalui

interaksi budaya dan pengalaman sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk memahami praktik gastrodiplomasi, karena makanan menjadi medium komunikasi budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan memungkinkan terjadinya interaksi sosial lintas budaya.

Gastrodiplomasi Tiongkok melalui *Chinese food* di Inggris dapat dipahami sebagai bagian dari praktik diplomasi publik yang berorientasi pada pembentukan citra dan pemahaman budaya di tingkat masyarakat. Kehadiran *Chinese food* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Inggris menciptakan ruang interaksi sosial informal yang memungkinkan masyarakat Inggris berinteraksi langsung dengan budaya Tiongkok. Melalui pengalaman konsumsi makanan tersebut, diplomasi publik bekerja secara tidak langsung dalam membentuk persepsi, penerimaan, dan kedekatan budaya masyarakat Inggris terhadap Tiongkok, sehingga berkontribusi pada pembangunan hubungan sosial budaya antara kedua negara dalam jangka panjang.

2.3 Soft Power

Soft power suatu negara adalah kemampuannya untuk memengaruhi kebijakan luar negeri dan opini publik tanpa menggunakan ancaman langsung, intimidasi, atau insentif moneter. Joseph S. Nye menjelaskan bahwa *soft power* bekerja dengan cara membentuk ketertarikan terhadap nilai, budaya, dan kebijakan suatu negara, sehingga pihak lain secara sukarela mengikuti atau mendukung kepentingan negara tersebut. Dengan demikian, *soft power* berbeda secara mendasar dari *hard power* yang mengandalkan kekuatan militer dan

ekonomi sebagai instrumen utama pengaruh dalam hubungan antarnegara (Nye, 2004).

Berbeda dengan *hard power* yang beroperasi melalui tekanan langsung, *soft power* bekerja melalui proses sosial dan psikologis yang bersifat persuasif. Pengaruh yang dihasilkan tidak muncul secara instan, melainkan terbentuk melalui interaksi yang berulang dan berkelanjutan antara negara dan masyarakat asing. Dalam konteks ini, persepsi dan penerimaan publik internasional menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas *soft power*. Daya tarik yang kuat memungkinkan suatu negara memengaruhi pihak lain tanpa harus menggunakan instrumen kekuatan yang bersifat memaksa (Nye, 2004).

Menurut Nye, sumber utama *soft power* berasal dari tiga elemen penting, yaitu nilai budaya, politik, serta kebijakannya luar negeri. Halnya budaya berperan sebagai medium penting karena dapat menjangkau masyarakat lintas negara melalui simbol, praktik sosial, dan ekspresi keseharian yang mudah diterima. Nilai-nilai politik yang dijalankan secara konsisten serta kebijakan luar negeri yang dipersepsikan sah dan bermoral juga memperkuat daya tarik suatu negara. Dengan demikian, *soft power* tidak hanya berkaitan dengan apa yang dimiliki negara, tetapi juga bagaimana negara tersebut bertindak dan bagaimana tindakannya dipersepsikan oleh masyarakat internasional (Nye, 2011).

Dalam perkembangannya, *soft power* sangat bergantung pada respons masyarakat asing. Nye menekankan bahwa daya tarik tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh negara, karena penerimaan dan penilaian akhir berada di tangan pihak lain. Faktor sejarah, budaya, serta pengalaman sosial masyarakat

sasaran memengaruhi bagaimana *soft power* suatu negara diterima. Oleh karena itu, efektivitas *soft power* bersifat kontekstual dan dapat berbeda-beda antar negara maupun antar kelompok masyarakat (Nye, 2011).

Konsep *soft power* memiliki keterkaitan yang erat dengan diplomasi publik. Nye menjelaskan bahwa diplomasi publik merupakan salah satu instrumen utama dalam menyalurkan dan memperkuat *soft power*, karena melalui diplomasi publik negara dapat memperkenalkan nilai, budaya, dan kebijakannya kepada masyarakat asing. Melalui komunikasi, interaksi sosial, dan pertukaran budaya, diplomasi publik membantu membentuk persepsi positif yang menjadi dasar bagi daya tarik suatu negara di mata publik internasional (Nye, 2004).

Selain itu, *soft power* juga berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam membangun makna dan simbol yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Daya tarik tidak hanya muncul dari kebijakan atau pernyataan resmi, tetapi juga dari representasi simbolik yang tercermin dalam praktik budaya, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial yang diasosiasikan dengan negara tersebut. Melalui proses ini, *soft power* bekerja secara halus dengan memengaruhi cara masyarakat asing memahami dan menafsirkan identitas suatu negara, sehingga membentuk persepsi yang lebih luas mengenai peran dan posisinya dalam hubungan antarnegara.

Dalam konteks penerapannya, *soft power* berkembang melalui interaksi yang bersifat kumulatif dan berjangka panjang. Pengaruh yang dihasilkan bukan merupakan hasil dari satu tindakan atau program tertentu, melainkan dari

akumulasi pengalaman sosial yang dialami oleh masyarakat asing dalam berinteraksi dengan unsur-unsur budaya dan nilai suatu negara. *Soft power* tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran sosial, di mana masyarakat secara bertahap membangun penilaian dan sikap berdasarkan pengalaman dirasakannya langsung ataupun tidak.

Dalam konteks hubungan antarnegara kontemporer, *soft power* menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya peran masyarakat dan aktor non-negara dalam dinamika global. Arus informasi yang semakin terbuka, mobilitas manusia lintas negara, serta intensitas interaksi sosial memperluas ruang bagi penggunaan kekuatan non-material. Dalam kondisi ini, kemampuan suatu negara untuk membangun citra, legitimasi, dan kepercayaan melalui *soft power* menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan antarnegara yang stabil dan berkelanjutan (Nye, 2017).

Selain itu, *soft power* berperan dalam membentuk lingkungan hubungan antarnegara yang lebih kondusif bagi kerja sama. Ketika suatu negara memiliki daya tarik yang kuat di mata masyarakat internasional, hubungan antarnegara cenderung berlangsung dalam suasana yang lebih terbuka dan kooperatif. Dalam konteks ini, *soft power* tidak menggantikan peran kekuatan material, tetapi melengkapinya dengan menciptakan kondisi sosial dan psikologis yang mendukung tercapainya tujuan hubungan antarnegara secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, *soft power* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kekuatan yang bekerja melalui daya tarik dan penerimaan, bukan melalui paksaan secara langsung. Konsep ini menunjukkan bahwa nilai,

budaya, serta persepsi masyarakat memiliki peran dalam memengaruhi hubungan antarnegara, sehingga interaksi sosial dan kultural turut menjadi bagian dari dinamika hubungan tersebut.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran budaya, diplomasi publik, dan *soft power* dalam membentuk hubungan antarnegara. Sejumlah penelitian secara khusus menyoroti penggunaan makanan dan praktik kuliner sebagai sarana diplomasi budaya untuk membangun daya tarik dan penerimaan masyarakat asing. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bagaimana gastrodiplomasi digunakan sebagai instrumen diplomasi publik dalam konteks global maupun regional. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji gastrodiplomasi Tiongkok terhadap masyarakat Inggris masih terbatas. Oleh karena itu, peninjauan penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan posisi dan celah penelitian ini.

Terdapat judul studi ini yakni “Analisis Gastrodiplomasi terhadap Masyarakat Tiongkok dengan Inggris”, yang berfokus pada bagaimana praktik gastrodiplomasi digunakan sebagai sarana membangun hubungan dan persepsi masyarakat dalam konteks hubungan antara Tiongkok dan Inggris. Maka dari itu, adanya harapan bisa membuat lengkap terkait kajian sebelumnya dengan menyoroti aspek yang belum banyak dibahas, khususnya terkait sasaran masyarakat Inggris dalam praktik gastrodiplomasi Tiongkok.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Trang & Dat (2025), <i>Cultural</i> | Studi ini memakai metodologi | Hasil penelitian menunjukkan | Persamaan: Sama-sama membahas penggunaan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p><i>Diplomacy and Soft Power of China: Theory, Strategy and Application in South East Asia</i></p> | <p>kualitatif deskriptif dengan studi literatur serta analisa kebijakan terkait diplomasi budaya dan <i>soft power</i> Tiongkok.</p> | <p>bahwa diplomasi budaya merupakan instrumen <i>soft power</i> utama Tiongkok dalam membangun citra dan pengaruh terhadap masyarakat asing, meskipun penerapannya masih bersifat <i>state-centric</i>.</p> | <p>diplomasi budaya dan <i>soft power</i> Tiongkok dalam memengaruhi masyarakat asing. Perbedaan: Penelitian ini tidak membahas gastrodiplomasi dan tidak secara spesifik mengkaji masyarakat Inggris, sedangkan penelitian penulis berfokus pada gastrodiplomasi Tiongkok terhadap masyarakat Inggris.</p> |
| <p>Juanda (2019), Pengaruh Gastrodiplomasi Taiwan terhadap Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Indonesia di Sektor Kuliner</p> | <p>Studi ini memakai metodologi deskriptif kualitatif dengan tekniknya wawancara serta dokumentasi, yang dianalisa secara kualitatif untuk melihat praktik gastrodiplomasi Taiwan di Indonesia.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa gastrodiplomasi Taiwan berdampak positif terhadap sektor kuliner dan ekonomi kreatif Indonesia, ditandai dengan meningkatnya restoran dan produk kuliner khas Taiwan serta penerimaan masyarakat.</p> | <p>Persamaan: Sama-sama membahas gastrodiplomasi sebagai instrumen diplomasi publik yang memanfaatkan kuliner untuk membangun citra positif di mata masyarakat asing. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada Taiwan–Indonesia dan dampak ekonomi kreatif, sedangkan penelitian penulis menganalisis gastrodiplomasi Tiongkok terhadap masyarakat Inggris.</p> |
| <p>Cabral <i>et al.</i> (2024), <i>From the Kitchen to the Embassy: A Rapid Review of Gastronomic Approaches in Diplomacy</i></p> | <p>Studi ini memakai metodologi <i>rapid review</i> dengan pendekatannya kualitatif deskriptif, dengan penelaahan berbagai literatur akademik yang membahas gastrodiplomasi, diplomasi kuliner, dan <i>food diplomacy</i> dalam praktik</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan dan praktik kuliner berperan sebagai instrumen diplomasi budaya dan diplomasi publik yang digunakan negara untuk membangun daya tarik, citra positif, serta menjangkau masyarakat asing.</p> | <p>Persamaan: Sama-sama membahas gastrodiplomasi sebagai instrumen diplomasi budaya dan diplomasi publik yang menargetkan masyarakat asing. Perbedaan: Penelitian ini bersifat konseptual dan global, serta tidak secara spesifik membahas gastrodiplomasi Tiongkok terhadap masyarakat Inggris, yang</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | diplomasi internasional. | Gastrodiplomasi dipandang sebagai bagian penting dari strategi <i>soft power</i> . | menjadi fokus penelitian penulis. |
| Kim & Lee (2020) <i>Food Fight: Gastrodiplomacy and Nation Branding in Singapore's UNESCO Bid to Recognize Hawker Culture</i> | Studi ini memakai pendekatannya kualitatif lalu menganalisa dokumen kebijakan, pemberitaan media, serta respons publik untuk memahami praktik gastrodiplomasi Singapura. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa gastrodiplomasi dimanfaatkan sebagai strategi diplomasi publik dan nation branding untuk membangun citra nasional serta meningkatkan daya tarik budaya Singapura melalui promosi kuliner hawker. | Persamaan: Sama-sama membahas gastrodiplomasi sebagai instrumen diplomasi publik dan <i>soft power</i> yang menargetkan masyarakat asing. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada Singapura dan konteks UNESCO, sedangkan penelitian penulis menganalisis gastrodiplomasi Tiongkok terhadap masyarakat Inggris. |
| Ghafiqi (2023), <i>Gastrodiplomasi: Strategi Indonesia dalam Membangun Nation Branding di Kancah Internasional</i> | Studi ini memakai metodologi kualitatif deskriptif dengan studi literatur serta analisa kebijakan, dengan menelaah dokumen resmi serta kajian akademik terkait praktik gastrodiplomasi Indonesia. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa gastrodiplomasi dimanfaatkan sebagai strategi diplomasi publik dan <i>nation branding</i> untuk memperkenalkan budaya kuliner Indonesia serta membangun citra positif di mata masyarakat internasional. | Persamaan: Sama-sama membahas gastrodiplomasi sebagai instrumen diplomasi publik berbasis kuliner yang menargetkan masyarakat asing. Perbedaan Penelitian ini berfokus pada Indonesia dan aspek <i>nation branding</i> , sedangkan penelitian penulis menganalisis gastrodiplomasi Tiongkok terhadap masyarakat Inggris. |